

**JURNAL**  
**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN**  
**OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN**  
**INDONESIA**

**(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**AKBAR SURYA LANTORANDA**

(0910113068)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN  
OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN  
INDONESIA**

**(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)**

Oleh:

**AKBAR SURYA LANTORANDA  
NIM. 0910113068**

Disetujui Pada Tanggal:

Ketua Majelis

Anggota

**Eny Harjati, S.H.MHum.**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

Anggota

**Abdul Madjid, SH., MHum.**  
**NIP.19590126 198701 1 001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan N. Sakti, S.H., MH.**  
**NIP. 19640620 198903 1 002**

Dekan Fakultas Hukum

**Eny Harjati, S.H., MHum.**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**Dr. Sihabudin, SH., MH.**  
**NIP. 19591216 198503 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN  
OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

**(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)**

Oleh:

**AKBAR SURYA LANTORANDA**

**NIM. 0910113068**

Disetujui Pada Tanggal:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**ENY HARJATI, S.H.MHum.**

**NIP. 19590406 198601 2 001**

**ABDUL MADJID, SH., MHum.**

**NIP.19590126 198701 1 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**ENY HARJATI, S.H.MHum.**

**NIP. 19590406 198601 2 001**

## ABSTRAKSI

**Akbar Surya Lantoranda, 09101113068, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia, Eny Harjati, S.H., M. Hum.; Abdul Madjid, SH., M. Hum.**

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang adanya permasalahan mengenai tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia yang penegakan hukumnya terlihat kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelakunya. Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) jelas sangat berdampak dengan kerugian ekologis terhadap Negara Republik Indonesia. Sehingga peneliti merumuskan masalah tentang Realita putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dan Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dalam realita putusan di pengadilan tampak hakim dan jaksa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana denda yang rendah dan tidak sesuai kerugian apa yang diperbuat pelaku. Dasar pertimbangan Hakim sering tampak berbeda dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia tidak dapat menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Berdasar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda yang rendah berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand yaitu pidana denda yang lebih berat. Saran dari penulisan ini adalah Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil, bijaksana, setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa Warga Negara Asing yang Negara bersangkutan tidak memiliki perjanjian bilateral dan sesuai dengan rasa keadilan. Pemerintah harus aktif dalam melakukan perjanjian bilateral terhadap negara-negara yang banyak pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

## **ABSTRACT**

**Akbar Surya Lantoranda, 09101113068, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2013, Judge Decision Analysis In Drop Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Theft Fish By Foreigners In Indonesian Waters Region, Eny Harjati, SH, M. Hum.; Abdul Madjid, SH., M. Hum.**

Background on writing this essay about the author raised concerns about illegal fishing offenses (illegal fishing) committed by foreigners in Indonesian Waters region looks less appropriate law enforcement with criminal offenses committed culprit. The criminal act of illegal fishing (illegal fishing) clearly impacted by the loss of ecological the Republic of Indonesia. So researchers formulate the problem of Reality Judge's decision in imposing criminal sanctions on illegal fishing by foreign nationals in Indonesian waters and the Basic Region Judge against criminal illegal fishing by foreign nationals in Indonesian waters Territory.

The purpose of this study is to investigate, understand, and analyze the reality of the judge's decision in imposing sanctions against the perpetrators of the crime of theft of fish will be undertaken by foreign nationals in Indonesian waters and basic considerations of judges in imposing sanctions against the perpetrators of the crime of theft of fish are in doing by foreign nationals in Indonesian waters. This type of research is empirical research. Method used is the method of socio-juridical approach. The criminal act of illegal fishing (illegal fishing) conducted by foreigners in Indonesian waters in reality Territory in court judges and prosecutors seem less deterrent effect on criminals by imposing criminal penalties are low and do not fit what harm done offender. Basic considerations Judges often look different from the indictment the Prosecution.

The conclusion of this study is consideration Judges Association against criminal illegal fishing by foreign nationals in Indonesian waters Territory can not impose imprisonment under Based on Article 102 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 and Article 73 of the Law of the Republic Indonesia No.17 of 1985. Judge ruled very lightly fined to 4 (four) Vietnamese citizen defendants Criminal penalties are low in contrast to the previous decision of the judges ruled that severe criminal penalties to three (3) Thai citizen accused of criminal penalties are more severe. Suggestion of this paper is a judge should be able to give a fair verdict, commensurate with the gravity of the crimes done Foreigners who accused the State concerned does not have a bilateral agreement and in accordance with the sense of justice. Should be active in bilateral agreements against countries that many criminal illegal fishing in Indonesian waters.

## KATA KUNCI

1. Putusan Hakim adalah Putusan Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang diucapkan dalam sidang pengadilan.
2. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* dengan tidak memiliki surat penangkapan ikan (SIPI).
3. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang menjadi terdakwa dan diperiksa serta diputus bersalah oleh Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yaitu Warga Negara Vietnam dan Thailand.
4. Wilayah Perairan Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dihitung 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak menggunakan kebijakan hukumnya dan jika diluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara tidak dapat menggunakan kebijakan hukumnya.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan yang maha esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masnyarakat indonesia, adapun indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudra menyebabkan daerah lautan atau perairan mempunyai aneka sumber daya alam laut yang indah dan melimpah serta luas. Salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia terdiri atas pulau dengan garis pantai sepanjang luas perairan teritorial. Perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkat dari Tuhan yang maha esa.<sup>1</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang selanjutnya disebut pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.<sup>2</sup> Permasalahan *illegal fishing* di sebabkan sedikitnya dua hal yaitu Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing* di samping itu konflik kepentingan antar institusi nrgara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing*.<sup>3</sup> Kebijakan dalam penanggulangan *illegal fishing*

---

<sup>1</sup> Supriadi dan aliminudin , *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2011, hal, 5.

<sup>2</sup> Tribawono, *Op. Cit.*, 210.

<sup>3</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal 44.

yang menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.<sup>4</sup>

Adapun institusi negara yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri<sup>5</sup>. Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan<sup>6</sup>, Pengadilan Perikanan di Indonesia hanya berada di tujuh wilayah yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai.<sup>7</sup> Selama belum dibentuk pengadilan perikanan, perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peralihan dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan<sup>8</sup>. Hukum acara tindak pidana *illegal fishing* memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* yang lebih singkat daripada proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 6, pasal 73 ayat 7, pasal 76 ayat 5, pasal 76 ayat 6, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 108

<sup>5</sup> aliminudin, *Op. Cit.*, 431.

<sup>6</sup> Supramono, *Loc. Cit*

<sup>8</sup> aliminudin, *Op. Cit.*, 430.



perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>9</sup> Tujuan diadakanya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim. Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

Contoh kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Indonesia di antaranya:

1. Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 jam 14.35 wib, terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan BV 5347 TS miliknya berada pada posisi 06°-11°-45°LS, 109°-11°-18° BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/perairan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal penangkap ikan BV 5347 TS berbendera Vietnam di nahkodai oleh Mr. Pam Ngoc Tam. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dirjen Kelautan dan Perikanan RI di temukan alat tangkap ikan menggunakan jaring purse seine dan ikan hasil tangkap kurang lebih 100 kg (seratus kilogram) yang terdiri ikan layang, ikan kembung dan jenis ikan campuaran lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Pam Ngoc Tam oleh karena itu dengan pidana denda Rp.

---

<sup>9</sup> Supriadi dan Aliminudin, *Op. Cit.*, 442.

<sup>10</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 282.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Menyatakan Barang bukti Dirampas untuk negara berupa<sup>11</sup>:

- a. Kasko KM BV 5347 TS.Jarin Ikan Purse Seine.
- b. Kompas.Gps Navigator.
- c. Radio.Fish Finder.
- d. Radio SSB.
- e. Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang campuran sebanyak kurang lebih 100 kg.

Wilayah perairan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh Warga Negara Asing ini di tunjukkan dari jumlah perkara pencurian ikan yang ditangani oleh Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 hingga 2012 , yang di jelaskan pada tabel sebagai berikut<sup>12</sup>:

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2007	12 perkara
2.	2008	6 Perkara
3.	2009	0
4.	2010	0
5.	2011	0
6.	2012	0
Total		18 perkara

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang di lakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang di lakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia ?

---

<sup>11</sup> Supramono, Op. Cit., 123

<sup>12</sup> Hasil pra survey dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013 , Jam 13.00 WIB.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dalam Analisa Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan untuk menelaah prosedur pelaksanaan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian.<sup>13</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang realita putusan terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang menjadi satu didalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di jalan Laks. R.E. Martadinata No. 4, Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian karena pengadilan perikanan ini merupakan salah satu instansi yang banyak menangani kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing serta peneliti dapat mewancarai Hakim karir yang bersertifikat perikanan, Hakim Adhoc perikanan, dan Panitera Pengganti yang bertujuan untuk menganalisa putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 30

### C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat di batasi pada periode dan lokasi tertentu.<sup>14</sup> Populasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

#### 2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang di tampilkan di dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah Hakim yang pernah mengadili dan berwenang untuk mengadili tindak pidana perikanan. Teknik sampling adalah cara pengambilan sample penelitian. Teknik sampling yang digunakan teknik non random *Purposive Sampling/ Judgment Sampling* merupakan teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.<sup>16</sup> Responden adalah orang-orang yang dipilih peneliti untuk memperoleh data dan memberikan informasi terhadap penelitian.<sup>17</sup>

### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, data yang diperoleh dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya suatu hukum yang nyata.<sup>18</sup> Jenis data primer dalam penelitian ini adalah realita putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh

---

<sup>14</sup> Id. at 95

<sup>15</sup> Id. at 96

<sup>16</sup> Id. at 100

<sup>17</sup> Id. at 105

<sup>18</sup> Id. at 31

warga negara asing. Sumber data primer penelitian skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Perikanan Negeri Jakarta Utara dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana perikanan.

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari statistik jumlah perkara Pengadilan Perikanan Negeri Jakarta Utara, putusan kasasi Mahkamah Agung tindak pidana pencurian ikan, berkas-berkas penting kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Buku-buku hukum perikanan.
3. Data tersier, data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>20</sup> antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus bahasa inggris, Kamus bahasa hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer didapatkan melalui teknik wawancara langsung dan mendalam. Wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview Guide*).
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi Kepustakaan, yaitu studi dokumentasi yang di lihat dari putusan dan berkas-berkas penting yang ada di Pengadilan Perikanan Jakarta utara, penelusuran situs di internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

---

<sup>19</sup> Id. at 32

<sup>20</sup> Ibid

## **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data-data terhadap penelitian yang diperlukan terkumpul, maka diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah perairan Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah perairan Indonesia. Data dari penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara metode yuridis kualitatif, guna mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, mengenai apa yang dinyatakan oleh responden baik tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai bahan kajian untuk mendiskripsikan hasil dari masalah yang timbul dari penelitian tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Id. at 135

## HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

### A. Realita Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

#### 1. Fakta Putusan

Hasil penelitian skripsi ditemukan fakta dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand. Hal ini dijelaskan pada 2 (dua) tabel yaitu tabel 1.4 yang menjelaskan putusan pada tahun 2007 terhadap Warga Negara Vietnam dan tabel 1.5 putusan pada tahun 2008 terhadap Warga Negara Thailand, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

#### **Putusan dan Hal-hal yang Memberatkan serta yang Meringankan Pidana**

No	Warga Negara Terdakwa	Putusan	Hal-hal Yang Memberatkan	Hal-hal Yang Meringankan
1.	Vietnam	No:2127/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li><li>• 1 (satu) unit KM. BV 0585 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk negara.</li></ul>	Tidak di temukan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdakwa berlaku sopan.</li><li>• Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li><li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li><li>• Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>		mengulangi lagi.
2.	Vietnam	<p>No:2128/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 4509 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>• Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>
3.	Vietnam	<p>No:2142/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah)</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5058 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi</li> </ul>



			penangkapan ikan (SIPI).	
4.	Vietnam	No:2176/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : • Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah). • 1 (satu) unit KM. BV 5347 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator, 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Fish Finder, 1 (satu) buah Radio SSB, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara. • Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).	• Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. • Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. • Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).	• Terdakwa berlaku sopan. • Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. • Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam, terungkap dari hasil penelitian bahwa musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 yang dijelaskan dalam pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The*

*Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dan 105 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 dilelang untuk negara.

Hasil penelitian skripsi terhadap 3 (tiga) putusan pada tahun 2008 Pengadilan Perikanan Jakarta Utara menemukan fakta putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Putusan dan Hal-hal yang Memberatkan serta yang Meringankan Pidana**

<b>No</b>	<b>Warga Negara Terdakwa</b>	<b>Putusan</b>	<b>Hal-hal yang memberatkan</b>	<b>Hal-hal yang meringankan</b>
	Thailand	No:2246/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : • Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). • Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7739 terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. • Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).	Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.	• Terdakwa berlaku sopan. • Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. • Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
	Thailand	No:2247/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : • Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). • Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu Nawatif I milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. • Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).	Perbuatan terdakwa meresahkan nelayan Negara Republik Indonesia.	• Terdakwa berlaku sopan. • Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. • Terdakwa belum pernah dihukum.

				Terdakwa menyesali Perbuatanya dan tidak akan mengulangi lagi.
	Thailand	No:2248/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : • Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). • Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7724 milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. • Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).	Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.	• Terdakwa berlaku sopan. • Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. • Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatanya dan tidak akan mengulangi lagi.

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yaitu Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pidana perampasan atas uang hasil lelang kapal penangkap ikan yang dijelaskan pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dan 105 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 dilelang untuk negara.

## **B. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.**

### **1. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

#### **A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada 7 (tujuh) putusan pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Warga Negara Thailand yang diteliti ditemukan fakta dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tetap mencantumkan pidana penjara dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 yang berbunyi atau Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* tentang Hukum Laut.

gadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal ialah terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja yang didakwakan, sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan surat dakwaan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

#### **B. Keterangan saksi.**

Dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti terungkap fakta bahwa semua saksi didalam

persidangan merupakan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaanya yaitu<sup>22</sup>:

1. Bahwa benar terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Bahwa benar kapal terdakwa berbendera asing.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004.
5. Bahwa keterangan saksi dibernarkan oleh terdakwa.

### **C. Keterangan ahli**

Dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti terungkap fakta saksi ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya yaitu<sup>23</sup>:

1. Bahwa benar setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004.
2. Bahwa benar jarak kapal penangkapan ikan termasuk dalam Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI).
3. Bahwa sesuai keterangan Penyidik terdakwa mengoperasikan kapal dengan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

#### **D. Keterangan terdakwa.**

Keterangan terdakwa juga sebagai pelaku tindak pidana dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand terungkap keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan pada pokoknya yaitu<sup>24</sup>:

1. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan selama menjalani pemeriksaan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum.
2. Bahwa benar terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
4. Mengakui perbuatannya bahwa tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

#### **E. Barang-barang bukti.**

Barang bukti dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diajukan Jaksa Penuntut Umum antara lain<sup>25</sup>:

1. Kapal Penangkap Ikan.
2. Jaring Ikan.
3. Kompas.
4. Gps Navigator.
5. Radio.

---

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

6. Fish Finder.
7. Radio SSB.
8. Uang hasil lelang ikan yang ditangkap.

**F. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut.**

Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya terhadap 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand mempertimbangkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut. Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap dinyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

**2. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana**

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yaitu:<sup>26</sup>

- a. Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut



- b. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat izin penangkapan ikan (SIPI).
- c. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti menemukan fakta dalam hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
- d. Terdakwa menangkap ikan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak istri.

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisa yang berjudul Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Perikanan Jakarta Utara), yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realita Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia:
  - a. Dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 terlihat banyak terdakwa melanggar pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. pasal 73 (3) UU No.17 tahun 1985 Tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 Tentang Hukum Laut dan 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand berdasarkan pelanggaran pasal 93 ayat 2 jo. pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
  - b. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu:
    1. Pidana denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana pencurian ikan dirampas dan dilelang untuk negara. Tindak pidana *Illegal Fishing* merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan (ekologis) sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat merumuskan penjatuhan pidana denda yang setimpal dengan kerugian secara ekologis dengan beratnya kejahatan yang di lakukan terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan.
    2. Berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga

Negara Thailand yaitu pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), serta alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana pencurian ikan dirampas dan dilelang untuk negara.

2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 sering bertentangan dengan surat dakwaan penuntut umum. Berdasar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985. Kedua pasal tersebut sangat jelas mengatur tentang jika tidak ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara pelaku tindak pidana pencurian ikan yang bersangkutan ketentuan pidana penjara tidak berlaku.
- b. Dakwaan merupakan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, Jaksa Penuntut Umum harusnya menggunakan dakwaan tunggal bukan menggunakan dakwaan subsidair dan memberatkan pidana denda dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 sehingga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak jauh berbeda dengan surat dakwaan. Berbeda 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand tahun 2008, Jaksa Penuntut Umum yang sudah benar dalam membuat dakwaannya.
- c. Hal-hal yang memberatkan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand sebagai berikut:
  1. Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah peneglolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.

Hal-hal yang meringankan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa menangkap ikan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak istri.

### **Saran**

Saran berkenaan dengan Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Perikanan Jakarta Utara), sebagai berikut:

1. Sedikitnya perkara pidana perikanan di Pengadilan Khusus Perikanan Jakarta Utara memperlihatkan kurang efektifitasnya pengadilan khusus perikanan ini, sehingga lebih baik persidangan pidana perikanan dilakukan di pengadilan negeri seperti tindak pidana umum biasanya. Apabila keberadaan pengadilan perikanan akan dipertahankan, maka perlu Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum juga harus diadakan, dilengkapi dan ditingkatkan sehingga Peradilan Khusus Perikanan tetap efektif.
2. Kurang efektifnya Pengadilan Khusus Perikanan juga berdampak memberikan beban terhadap Pemerintah dengan anggaran gaji hakim adhoc yang kinerjanya ikut serta-merta kurang efektif karena jaranganya persidangan pidana perikanan.
3. Jaksa harus membuat surat dakwaan yang benar sesuai dengan semua Undang-Undang yang mengatur peniadaan sanksi pidana penjara maupun pidana kurungan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pidana

pencurian ikan sehingga tidak terjadi pertentangan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil, bijaksana, setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa Warga Negara Asing yang Negara bersangkutan tidak memiliki perjanjian bilateral dan sesuai dengan rasa keadilan. ini dikarenakan perbuatan pidana terdakwa memberikan dampak kerugian ekologis terhadap hasil laut yang telah dicuri yang dapat mengakibatkan pengelolaan sumber daya ikan di perairan indonesia terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2008.

Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 2011.

Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan dan Laut Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

Supriadi dan aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta , 2012

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 tentang Hukum Laut

### **Internet:**

<http://www.republika.co.id>, berita nasional hukum indonesia-miliki-7-pengadilan-tindak-pidana-perikanan.

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/Kapal-Illegal-Fishing-Dirampas-Untuk-negara/>.

<http://pencurianikanolehwaranegaraasing.com>, muktharA.PI, penangkapan ikan ilegal dan dampaknya bagi perikonomian indonesia.

[http:// implementasi penegakkan hukum pidana.co.id](http://implementasi.penegakkan.hukum.pidana.co.id), sajipto rahardjo, penegakkan hukum dalam pidana.